

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 tidak seratus persen merdeka sebagai negara yang berdaulat. Kemerdekaan seakan-akan tidak memiliki arti apa-apa dengan melihat keteguhan negara-negara kolonial yang masih berusaha kembali menjajah, salah satunya ialah Belanda. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya Agresi Militer pertama, Agresi Militer kedua, Konferensi Meja Bundar (KMB), membagi wilayah Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS).

Tahun-tahun awal kemerdekaan merupakan masa rentan bagi negara yang baru saja berdiri. Selain Belanda yang masih berusaha kembali menduduki Indonesia, pemerintah juga memikul beban berat dalam mengurus rakyatnya. Berabad-abad rakyat hidup dalam masa penjajahan memberi dampak buruk pada mental bangsa seperti rasa tertinggal, rasa kurang percaya diri, rasa bodoh dan sebagainya.

Mental budak terjadi merupakan akibat dari berabad-abad lamanya dibawah masa penjajahan kolonial. Dalam menyikapi hal tersebut, maka diperlukan revolusi di segala bidang tidak terkecuali di bidang kebudayaan, kesenian, khususnya kesusastraan. Sebenarnya, dalam bidang kebudayaan para seniman telah lama memperjuangkan suara rakyat. Seperti yang terjadi pada masa penjajahan Jepang. Para seniman pelukis membentuk sanggar-sanggar untuk mengekspresikan realitas kehidupan pada saat itu. Tema seni

lukis secara sosiologis bersumber pada unsur sosial, ekonomi, dan politik yang kondisinya semakin berat. Dalam kesusastraan, para sastrawan telah menggunakan karya sastra sebagai alat untuk mendeskripsikan realitas sosial, khususnya konflik antar kelas.

Kebudayaan menjadi salah satu bentuk identitas bangsa yang di dalamnya terdapat kesusastraan dan kesenian, keduanya menjadi arena yang tidak dapat menghindar dari keadaan ini. Sastra memiliki posisi tersendiri dalam perkembangan masyarakat. Tidak sekedar perwujudan ide dan cetusan pikiran saja, melainkan juga sebetuk cermin untuk melihat realita sosial yang terjadi. Bentuk yang lebih emosional dan terstruktur dalam menggagas karya sastra sebagai cermin sosial adalah organisasi seni budaya.

Lekra muncul untuk mencegah kemerosotan lebih lanjut dari garis revolusi. Bukan cuma para politikus yang mengemban tugas penting ini, melainkan juga para pekerja kebudayaan. “Lekra didirikan untuk menghimpun kekuatan yang taat dan teguh mendukung revolusi dan kebudayaan nasional.” Mukadimah Lekra juga menyebutkan lembaga itu bekerja di lapangan kebudayaan, terutama kesenian dan ilmu. Lekra menghimpun tenaga dan kegiatan para seniman, sarjana, dan pekerja kebudayaan lainnya. “Lekra mengajak para pekerdja-pekerdja kebudajaan untuk sadar mengabdikan daja-tjipta Indonesia, kemerdekaan Indonesia, pembaruan Indonesia.”¹

¹ Yulianti dan Dahlan, *Lekra tak Membakar Buku*. Yogyakarta: Merakeusumba, 2018, hlm.22.

Lekra berdiri 17 Agustus 1950. Lekra berdiri sekitar enam bulan setelah terbitnya Surat Kepercayaan Gelanggang. Lekra mengambil aliran atau paham keseniannya adalah realisme sosialis. Berdirinya Lekra sendiri digagas oleh D.N. Aidit, Njoto, M.S. Ashar, A.S. Dharta. Anggota Lekra pada masa awalnya antara lain adalah Henk Ngantung, Sudharnoto, Herman Arjuno, dan lain-lain.²

Ketika Lekra dibentuk bulan Agustus 1950, usaha untuk menentukan cara praktik kultural mewujudkan kebangsaan Indonesia yang ideal telah dilakukan dua puluhan tahun sebelumnya. “Kebudayaan Indonesia” telah menjadi isu perdebatan dan diskusi intelektual sejak tahun 1930-an, ketika seniman dan kaum intelektual berpemikiran nasionalis terlibat dalam serangkaian polemik kebudayaan nasional melalui tulisan dalam majalah Pujangga Baru.

Realisme sosialis itu diadaptasi dari pemikiran Sutan Sjahrir pada tahun 1938 seperti yang tertulis pada peringatan 5 tahun Pujangga Baru. Pemikiran itulah yang dijadikan landasan penciptaan seni oleh kaum Lekra. Realisme sosialis sendiri awalnya muncul di Uni Soviet sekitar abad 20. Peristiwa yang melatarbelakangi lahirnya realisme sosialis itu adalah usaha menentang pemerintah dalam peristiwa Minggu Berdarah 22 Januari. Maxim Gorky yang bertugas sebagai pengelola Bolsjewik (Hidup Baru) yang berada dalam kendali Lenin.³

² Susanto, *Lekra, Lesbumi, Manifes Kebudayaan: Sejarah Sastra Indonesia Periode 1950-1965*. Yogyakarta: CAPS, 2018, hlm.29.

³ Susanto, *op.cit.*, hlm.30.

Lenin memiliki pandangan bahwa kekuatan kultural ataupun kesastraan harus bertujuan untuk melanggengkan ataupun mendukung perjuangan sosialisme. Konsepnya yang dibawa oleh kelompok realisme sosialis itu diantaranya adalah bahwa kegiatan sastra harus menjadi bagian dari kepentingan umum kaum proletariat, menjadi roda dan sekrup kesatuan besar mekanisme sosial-demokratik, digerakan oleh seluruh barisan depan kelas pekerja yang berkesadaran politik. Kegiatan sastra harus menjadi unsur daripada gabungan partai dan hubungan sosial-demokratik yang terorganisasi dan terencana.

Awalnya, kata Yahaya Ismail dalam *Pertumbuhan, Perkembangan dan Kejatuhan Lekra di Indonesia* menyebutkan bahwa aktivitas kebudayaan Lekra diwadahi dalam lembaga-lembaga kreatif, yang meliputi lembaga seni rupa, film, sastra, dan seni drama. “Untuk melicinkan perjalanan organisasi, setiap cabang Lekra mempunyai seorang wakil yang duduk dalam pimpinan pusat.” Menurut Amarzan, Joebaar pernah bercerita kepadanya bahwa Lekra didirikan mula-mula sebagai sebuah lembaga semacam LP3ES (Lembaga penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial). “Jadi, dia tidak bercabang-cabang, makanya dipilih lembaga.”⁴

Yang terjadi kemudian, kata dia, setelah Lekra bercabang-cabang, banyak cabang dan bahkan anak cabang yang tidak didirikan oleh Lekra, tapi oleh PKI. Partai di daerah merasa tidak lengkap tubuhnya kalau tidak

⁴ Tempo, *Lekra dan Geger*. Jakarta: KPG, 2015, hlm.8.

punya Lekra. “Misalnya Deli Serdang. Komite Seksi PKI Deli Serdang membentuk Lekra, baru dilaporkan ke pimpinan daerah.”

Para elite politik memiliki peran yang penting dalam menggerakkan situasi sosial dan politik pada zaman ini guna mencapai tujuan yang “sama” (memakmurkan atau mengisi “kemerdekaan”), para kelompok politik ini memiliki cara yang berbeda. Persamaan tujuan ini menjadi ciri khas politik Indonesia ketika itu. Cara yang berbeda itu menjadi bom waktu yang menjadi ancaman untuk memecah belah para intelektual dan politikus zaman itu, entah kenapa ambisi pribadi atau kelompok ataupun pengaruh kekuatan asing.

Tampaknya, perang tujuan atau ideologi dan pemikiran yang berbeda-beda dapat memicu perbedaan para sastrawan ataupun intelektual pada zaman ini. Hakikatnya mereka memiliki tujuan yang sama yakni memajukan dan memakmurkan masyarakat Indonesia sesuai dengan ideologi dan pemikiran yang diyakininya. Mereka memiliki tujuan yang sama, tetapi mereka memiliki cara yang berbeda dalam mencapainya.

Kenyataan tersebut menimbulkan situasi era 1950 hingga menjelang 1965 dalam kesusastraan yang menjelma dalam satu tindakan yang bersifat politis. Kesusastraan Indonesia melakukan politik praktis atau kesusastraan menjadi arena perebutan politik dari kelompok aliran (partai) untuk tujuan mereka.

Ada yang mengatakan bahwa kesusastraan itu melakukan tindakan aktif sehingga dia bisa memengaruhi atau mengubah keadaan sosial politik

pada zamannya. Hal ini sangat memungkinkan sebab ada dua atau setidaknya lebih dari satu ideologi atau pemikiran yang saling merebut wacana kekuasaan atau wilayah kebudayaan. Ada pendapat yang mengungkapkan bahwa kesusastraan dijadikan arena atau dibawa ke dalam permainan politik. Tentu saja, ada kekuatan itu yang didasarkan pada pemikiran atau ideologi tertentu untuk menggerakannya.

Dalam terminologi ini, kesusastraan menjadi korban dari perebutan ideologi karena dia hanya menjadi alat untuk mencapai tujuan itu. Dalam konteks sosiologis, keadaan ini dapat diinterpretasikan bahwa sastra sebagai satu produk sosial menjadi satu pertimbangan tersendiri.

Awalnya, kata Yahaya Ismail dalam *Pertumbuhan, Perkembangan dan Kejatuhan Lekra di Indonesia* menyebutkan bahwa Surat Kepercayaan Gelanggang dipandang sebagai awal dari munculnya perdebatan budaya di era tahun 1950 hingga 1965. Perdebatan budaya itu memang sudah ada sejak Polemik Kebudayaan yang dipicu oleh tulisan Sutan Takdir Alisjahbana tentang kebudayaan baru. Kebudayaan yang memutus tradisi masa lalu dan menuju ke depan dengan menitik beratkan pada nilai-nilai Barat.⁵

Surat ini merupakan satu pernyataan sikap tentang kebebasan kreatif dan universal tentang seni sebab landasan pijak dari pernyataan tersebut adalah individualisme dan internasionalisme dalam bidang kesenian. Surat Kepercayaan Gelanggang sering diistilahkan sebagai ibu kandung dari

⁵ Susanto, *op.cit.*, hlm.4.

Manifes Kebudayaan atau manifestasi dari nilai-nilai universalisme yang humanis. Dia tidak terorganisasi secara formal dalam organisasi apa pun.

Terjemahan teks lengkap dari Manifesto Lekra, Mukadimah dimasukkan sebagai pelengkap artikel, beserta Surat Kepercayaan Gelanggang dan Manifes Kebudayaan. Dalam tulisan tersebut, Mukadimah dirujuk dalam satu alinea pendek. Kesan keterlibatan ideologis yang dekat di materinya muncul jelas pada komentarnya: “Pada tanggal 17 Agustus, Lekra...organisasi budaya PKI...dibentuk, kurang dari dua tahun setelah revolusi komunis kedua dipadamkan di tengah perjuangan kemerdekaan Indonesia (Peristiwa Madiun, 18 September 1948). Mukadimah Lekra tentu saja berdasarkan realisme sosial.”⁶

Realisme sosialis sendiri secara resmi muncul pada tahun 1932 setelah Konferensi XVII Partai Komunis Uni Soviet (30 Januari-4 Februari 1932). Realisme sosialis sendiri muncul dari ajaran Karl Max yang menguraikan perjuangan manusia yang tertindas secara keseluruhan atau sebagian kelompok, bukan perjuangan yang bersifat individual.⁷

Pada Dostoevsky, realisme hadir sebagai suatu potret akan keadaan yang sesungguhnya dihidupi oleh manusia. Dengan demikian, seni haruslah mengungkapkan hal yang nyata-nyata ada dalam kehidupan. Realisme di Rusia menjadi semacam *trend* dalam kesenian Rusia sejak masa Tsar Peter Agung.⁸

⁶ Folcher, Keith. *Komitmen Sosial dalam Sastra dan Seni: Sejarah Lekra 1950-1965*. Bandung: Pustaka Pias, 2020, hlm.12.

⁷ Susanto, *op.cit.*, hlm.45-46.

⁸ Sabari, Henry. *Dostoevsky: Menggugat Manusia Modern*. Yogyakarta: Kanisius, 2008, hlm. 111.

Karakteristik Realisme Sosialis memiliki ciri khas tersendiri dalam manifestasi di karya sastra. Karya-karya sastranya menunjukkan sikap yang menentang, melawan, dan menyerang golongan atau kelompok yang dipandang menghancurkan dan menjajah rakyat ataupun mereka yang menindas rakyat. Sehingga, hal ini menunjukkan bahwa terdapat dua kelompok dalam masyarakat yang saling bertentangan.

Kesastraan yang digunakan oleh Lekra dapat dicontohkan melalui usaha penulisan kembali sejarah sastra Indonesia. Dalam rubrik Lentera di harian *Bintang Timur* dikatakan bahwa sejarah sastra Indonesia harus dilihat kembali dengan menempatkan kesastraan yang selama ini tidak dianggap sebagai bagian dari sastra Indonesia. Dari gagasan ini dapat dikatakan bahwa kemunculan sejarah kesastraan yang hanya menempatkan sastra Balai Pustaka seperti yang dikemukakan oleh A. Teeuw dan H.B. Jassin adalah sebuah “Pembaratan” dalam tradisi kesastraan Indonesia. Hal ini menyebabkan bahwa awal penolakan dan pengecualian terhadap sastra yang diungkapkan sebagai salah satu bentuk radikalisme.

Sebagai sebuah usaha yang bersifat pergerakan dan revolusioner, kelompok Lekra ini tidak hanya menerbitkan karya sastra sebagai perpanjangan dari ideologinya. Namun, kelompok ini bersinergi dengan melakukan berbagai strategi. Salah satunya adalah mendirikan komisi atau semacam badan yang mendukung usahanya itu. Badan itu diantaranya adalah Yayasan Pembaruan dan Komisi Penerjemahan. Kedua badan ini bertujuan untuk memberikan edukasi melalui literasi tentang ajaran

Marxisme. Mereka melakukan terjemahan karya-karya sastra asing dan pemikiran tokoh Marxis di dunia. Sebagai contohnya adalah terjemahan *Ibunda* dari Maxim Gorky dan *Kisah Manusia Sedjati* dari Boris Polewoi. Dengan menerbitkan buku-buku tersebut, Lekra dapat dengan cepat mencapai tujuannya yang mana hal serupa juga didukung oleh Partai Komunis Indonesia.

Kedua lembaga antara Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) dan Manifes Kebudayaan (Manikebu) sama-sama memiliki visi kesusastraan. Lekra dengan aliran Realisme Sosialis, sedangkan Manikebu dengan Humanisme Universal. Di atas kertas, kedua lembaga ini sama-sama memiliki pendirian teguh terkait pilihan filosofi negara, yakni Pancasila. Di Manikebu, bahkan Pancasila dijadikan sumber falsafah keberlangsungan aktivitas-aktivitas yang diselenggarakan Manikebu.⁹

Di kertas kerja penjelasan Manifes Kebudayaan mengenai Pancasila sebagai falsafah kebudayaan, kita bisa melihat penafsiran kelompok Manikebu yang melihat Pancasila sebagai basis legitimasi humanisme kultural yang mengandaikan kebebasan-kebebasan individu dalam berekspresi dan berkesenian. Masih di kertas yang sama, penjelasan mengenai Pancasila sebagai legitimasi dari Humanisme Universal.

Konsepsi Pancasila yang dipahami Lekra memiliki kesamaan dengan apa yang dimengerti oleh Manikebu, namun, perbedaan-perbedaan

⁹ Moeljanto dan Taufik, *Prahara Budaya: Kilas-balik ofensif Lekra/PKI dkk.* Bandung: Mizan, 1995, hlm.170.

tegas antara keduanya tidak boleh dinafikan sama sekali. Lekra, sesuai keputusannya dalam Konfrensi Nasional I Lembaga Sastra Indonesia yang berlangsung di Medan dari tanggal 22 sampai 25 maret 1963, menyatakan sikap mendukung Manipol Soekarno serta menganjurkan untuk tidak memisahkan sastra dengan politik.¹⁰

Bagi mereka, persoalan sastra bukanlah persoalan pengambil-alihan siapa mengabil-alih pekerjaan siapa, melainkan, letak persoalan sastra pada sumbangannya pada pembangunan bangsa, pada emansipasi petani yang merupakan anasir penting bagi kesejahteraan seluruhnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana awal berdiri Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) sebagai gerakan kebudayaan yang berperan dalam mengembangkan sastra di Indonesia pada tahun 1950-1965.
2. Bagaimana kerangka kerja Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) dalam membentuk wacana serta kegiatan-kegiatan kebudayaan dan seni mengembangkan sastra di Indonesia selama kurun waktu 1950-1965.
3. Bagaimana pengaruh aliran Realisme Sosialis yang dibawa Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) terhadap

¹⁰ Yulianti, *op.cit.*, hlm.107.

kesusastraan di Indonesia pada sekitaran tahun 1950-1965 sehingga terjadi konflik ideologis antara Lekra dan Manifes Kebudayaan (Manikebu) yang beraliran Humanisme Universal.

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan dan pembatasan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) dalam mengembangkan sastra di Indonesia dari kurun waktu tahun 1950 sampai dengan 1965. Adapun tujuan-tujuan khususnya antara lain:

1. Untuk mengetahui profil Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA).
2. Untuk mengetahui kerangka kerja Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) dalam mengembangkan kesusastraan di Indonesia 1950-1965.
3. Untuk mengetahui pengaruh ideologi yang dibawa Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) terhadap kesusastraan di Indonesia 1950-1965 sehingga terjadi konflik ideologis antara Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) dan Manifes Kebudayaan (Manikebu).

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Siliwangi. Diharapkan hasil dari penelitian ini akan

dapat menambah ilmu, pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam memahami sumbangan Lembaga Kebudayaan Rakyat untuk Bangsa Indonesia. Penelitian skripsi ini juga memberi pengalaman tersendiri bagi penulis. Skripsi ini pun dapat digunakan sebagai kajian lebih lanjut lagi bagi institusi atau lembaga terkait, mahasiswa, dan pihak lain yang membutuhkan.

1.5 Tinjauan Teoritis

1.5.1 Kajian Teoritis

1.5.1.1 Teori Politik Sastra

Sastra tidak pernah terlepas dari politik, atau tidak pernah terlepas dari kepentingan-kepentingan politis pihak-pihak tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan. Hubungan antara sastra dan politik bukan sebagai dua hal mandiri yang mempunyai persinggungan-persinggungan di tepi wilayah masing-masing. Batasan yang membedakan sastra dari yang bukan sastra itu sendiri terbentuk oleh dan sekaligus membentuk hubungan-hubungan kemasyarakatan yang berpolitik.¹¹

Dengan demikian, irisan antara proses kreatif penciptaan tulisan sastra akan sangat berpengaruh atas kondisi-kondisi material di sekitarnya. Lingkungan masyarakat turut membentuk preferensi karya-karya sastra. Hal tersebut juga seturut dengan penjelasan yang diberikan oleh Jakob Sumardjo, bahwa setiap golongan masyarakat memiliki seperangkat

¹¹ Ariel Heryanto, *Perdebatan Sastra Kontekstual*. Jakarta: Rajawali, 1985, hlm.39.

pengetahuan nilai-nilai, seperangkat cara berpikir dan bersikap sesuai dengan dasar-dasar infrastruktur dan struktur sosial-politik yang dipilihnya. Dengan demikian, juga cara mereka mengekspresikan rasa keindahannya sesuai dengan ideologi masyarakat tadi. Konjungtur kehidupan sosial-politik turut membentuk kesenian-kesenian yang berasal dari realitas di sekitar. Selain memungkinkan penciptaan karya sastra, hubungan antara sastra dengan kondisi sosial-politik juga dapat berubah dan berbalik. Bagaimana spektrum politik justru menentukan eksistensi karya sastra yang diciptakan.

1.5.1.2 Sastra Bandingan

Dalam Studi perbandingan, obyek yang diteliti harus lebih satu. Oleh karena itu setiap obyek harus ditelaah terlebih dahulu. Setiap karya sastra yang diasosiasikan dalam lembaga kebudayaan, atau komunitas, atau kelompok ditelaah unsur strukturnya terlebih dahulu kemudian dibandingkan dan dicari persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam kedua kelompok kebudayaan tersebut.

Sastra bandingan dalam penelitian ini akan berbeda dengan metode sastra bandingan lainnya yang sering digunakan. Istilah sastra bandingan yang banyak disumbangkan oleh Weisstein dengan istilah *Comparative Literature*, dengan pengutamaan kesustraan antar bangsa, Weisstein, melalui Remark mengemukakan bahwa Sastra bandingan adalah studi sastra di luar batas-batas satu negeri tertentu, dan studi hubungan antara kesusastraan satu negeri dengan negeri-negeri lain, tidak hanya

perbandingan kesusastraan saja, tetap juga perbandingan kesusastraan dengan ekspresi kemanusiaan yang lain seperti agama, filsafat, sejarah dan sebagainya.¹²

Oleh sebab itu, Sapardji Djoko Damono mengambil sikap yang berbeda terkait studi sastra bandingan tersebut. Sastra bandingan lebih merupakan suatu metode untuk memperluas pendekatan atas sastra suatu bangsa saja. Menurut Sapardi, sastra bandingan bukan saja hanya sekedar mempertentangkan dua aliran sastra dari dua negara atau bangsa, bukan pula terpatok kepada karya-karya besar.¹³

1.5.1.3 Sosiologi Sastra

Sosiologi sastra berdasarkan prinsip bahwa karya sastra (kesusastraan) merupakan refleksi masyarakat pada zaman karya sastra (kesusastraan) itu ditulis, yaitu masyarakat yang melingkupi penulisnya sebab sebagai anggotanya penulis tidak dapat lepas darinya.¹⁴ Hal penting dalam sosiologi sastra adalah konsep cermin (mirror). Dalam kaitan ini, sastra dianggap sebagai mimesis (tiruan) masyarakat. Kendati demikian, sastra tetap diakui sebagai sebuah ilusi atau khayalan dari kenyataan. Dari sini, tentu sastra tidak akan semata-mata menyodorkan fakta secara mentah. Sastra bukan sekadar copy kenyataan, melainkan kenyataan yang telah ditafsirkan. Kenyataan tersebut bukan jiplakan yang kasar, melainkan sebuah refleksi halus dan estetis.¹⁵

¹² Pradopo, *Kritik Sastra Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gama Media, 2002, hlm.21.

¹³ Sapardi, *Sastra Bandingan Pengantar Ringkas*. Ciputat: Editum, 2005, hlm.7.

¹⁴ Pradopo, *op.cit.*, hlm.22.

¹⁵ Suwardi Endraswara, *Metode Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka. 2003, hlm.78.

Oleh Abraham (dalam Pradopo), istilah sosiologi sastra dikenakan pada tulisan-tulisan para kritikus dan ahli sejarah sastra yang perhatian utamanya ditujukan pada cara-cara seorang pengarang dipengaruhi oleh status kelasnya, ideologi masyarakat, keadaan-keadaan ekonomi yang berhubungan dengan pekerjaannya, dan jenis pembaca yang dituju. Dengan pengertian di atas, dapat dilihat satu penjelasan yang lebih tegas terkait keadaan-keadaan masyarakat dan kekuatan-kekuatan pada zamannya, yaitu dalam pokok masalahnya, penilaian-penilaian kehidupan yang implisit dan eksplisit yang diberikan tidak dapat dihindarkan dari proses kreatif penghasil karya sastra.

Proses penciptaan karya sastra antara kelompok Lekra dan Manikebu tentu berlainan satu sama lain. Entah itu lingkungan hasil buku bacaan, aliran filsafat, sikap politik, dan ini semua dimungkinkan dari interaksi sosial yang terjadi. Di ruang inilah kita mampu menangkap makna politik sastra tersebut.

Dari sini, penelitian ini akan berupaya melihat jenis interaksi seperti apa yang ingin dilihat penguasa, karena konteks kekuasaan yang melahirkan struktur sosial-politik yang mendeterminasi bagaimana sebuah masyarakat tersebut berpikir, berkebudayaan, sampai proses penciptaan karya sastra.

1.5.1.3 Teori Konflik

Konflik merupakan gejala sosial alamiah yang terjadi di setiap dan di seluruh masyarakat. Artinya konflik selalu inheren di dalam setiap individu maupun masyarakat. Karena bersifat inheren, masyarakat ada di

dalam dan senantiasa menjadi arena pertentangan-pertentangan antara satu dengan yang lain.

Konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir, dilangsungkan, atau dieliminir saingannya.¹⁶

Lewat pengertian di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa konflik merupakan salah satu interaksi sosial yang bersifat oposisi. Ada subjek yang mempertahankan nilai dan subyek yang lain hadir untuk menggoyang dengan ragam macam perlakuan.

1.5.2 Kajian Pustaka

Penelitian merupakan masalah yang harus dipahami sehingga diperlukan beberapa referensi yang dapat dijadikan panduan penulisan nantinya dalam bentuk tinjauan pustaka. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa buku sebagai bahan referensi yang menimbulkan gagasan, konsep, teori, dan mengarah pada pembentukan hipotesa, dan sumber informasi atau pendukung tulisan yang akan dibuat.

1.5.2.1 Lekra Tak Membakar Buku (Rhoma Dwi Aria dan Muhidin M Dahlan, 2008)

Buku ini bisa dianggap sebagai buku yang paling komprehensif mengenai Lekra yang disusun secara sistematis dalam sepuluh bab plus

¹⁶ Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1998, hlm.159.

daftar singkatan/akronim, lampiran, dan indeks. Dimulai dari bab Mukadimah yang mencatat situasi menjelang Kongres 1 Lekra (1959) ketika seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia harus segaris dengan Manifes Politik (Manipol)-nya Sukarno. Demikian pula dengan sikap berkebudayaan yang arahnya sudah jelas: “Seni untuk Rakyat” dan “politik adalah panglima kebudayaan”. Pada intinya buku ini memang mengupas habis kerja-kerja kreatif yang dihasilkan Lekra selama 15 tahun (1950-1965) di bidang kebudayaan sebelum lembaga ini dibekukan dan seluruh kegiatannya dihapus dari memori dan sejarah bangsa Indonesia. Namun, demikian ada yang mengkritik buku ini karena hanya bersumber dari guntingan-guntingan artikel lembar kebudayaan Harian Rakyat tanpa mencari sumber lain berupa wawancara terhadap pelaku sejarah yang masih hidup atau sumber-sumber kepustakaan lain.

1.5.3 Hasil Penelitian yang Relevan

“LEKRA DALAM PERKEMBANGAN POLITIK DI INDONESIA 1950-1965”

Skripsi Theresia Jabut mahasiswa Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta tahun 2017 dengan judul “Lekra dalam perkembangan politik di Indonesia 1950-1965”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lekra berdiri pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan diluncurkannya Mukadimah Lekra. Lembaga ini menjadi wadah aspirasi dari setiap ide kreatif para seniman dan rakyat kecil.

Lekra bekerja khususnya di bidang kebudayaan. Tujuan dibentuk Lekra adalah mendukung revolusi dengan cara membangun kebudayaan nasional.

Usaha yang dilakukan Lekra di atas merupakan langkah untuk menghapus kebudayaan kolonial dan menggantikannya dengan kebudayaan asli Indonesia. Konsepsi Kebudayaan Nasional memberikan kebebasan yang besar kepada setiap pandangan hidup dan keyakinan seni dengan syarat mendahulukan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat.

Lembaga Kebudayaan Rakyat berusaha berjuang untuk menghancurkan sisa-sisa imperialisme, feodalisme, dan budaya Barat yang masih ada di Indonesia. Kebudayaan Barat yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa diusahakan untuk dihapuskan digantikan dengan kebudayaan asli Indonesia. Hal yang terpenting bagi Lekra ialah menghidupkan kembali kebudayaan-kebudayaan asli dari berbagai daerah. Oleh sebab itu, karya-karya dari para seniman Lekra lebih banyak bertemakan semangat revolusi untuk melakukan perubahan dalam bidang kebudayaan dengan mengusung kesenian dari berbagai daerah.

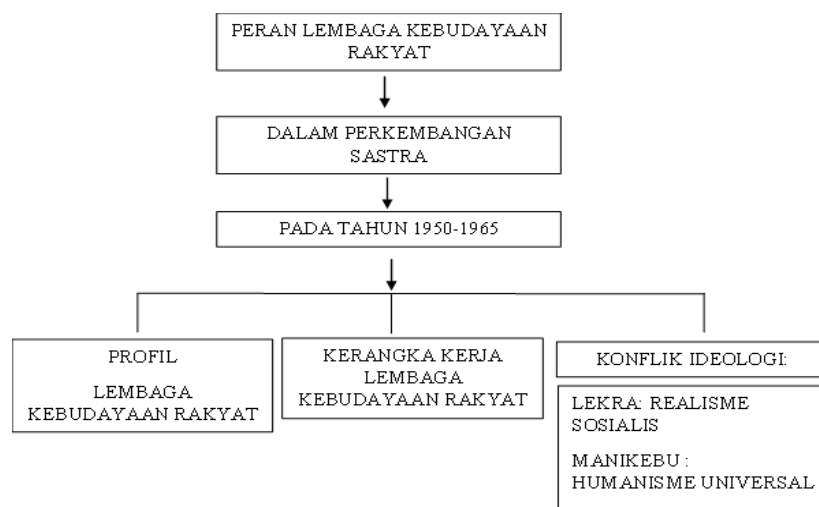
Pemikiran dasar Lekra ialah memerdekakan kehidupan rakyat dalam bidang kebudayaan. Hal ini lebih menekankan pada terpenuhi hak-hak rakyat, seperti hak kehidupan yang layak, hak atas pendidikan, dan hak kebebasan berekspresi. Hak-hak ini tidak pernah diperoleh pada masa kolonial. Pada masa penjajahan kehidupan rakyat merasa tertekan karena dipaksa untuk bekerja dengan upah yang kecil. Kemerdekaan yang diusung

Lekra ialah memperjuangkan kehidupan rakyat secara layak melalui seni dan kebudayaan-kebudayaan nasional.

Tidak hanya Lekra, lembaga kebudayaan lainnya ialah Manifes Kebudayaan yang didirikan oleh para penyair dan pengarang pada tanggal 17 agustus 1963. Dalam perkembangannya, kedua lembaga kebudayaan ini terlibat dalam berbagai perselisihan. Perselisihan ini merupakan dampak dari kondisi pergolakan politik di Indonesia pada masa itu.

Persamaan dalam karya tulis ilmiah Theresia yaitu polemik aliran sastra antara Lekra dengan Manikebu. Keduanya memiliki tujuan yang sama tetapi menempuh dengan cara yang berbeda. Lekra memiliki Realisme Sosialis, sedangkan Manikebu dengan Humanisme Universal. Demikian halnya, perbedaan penelitian Theresia diantaranya topik pokok pembahasan hanya mencangkup konflik ideologi politik, sedangkan penelitian ini pokok pembahasan meliputi tentang kesusastraan.

1.5.4 Kerangka Konseptual



Gambar 1.1. Kerangka Konseptual

1.6 Metode Penelitian

Metode historis merupakan seperangkat aturan dan prinsip sistematis dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara sistematis, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis. Metode sejarah dapat diartikan sebagai metode penelitian dan penulisan sejarah dengan menggunakan cara, prosedur atau teknik yang sistematis sesuai dengan asas-asas dan aturan ilmu sejarah.¹⁷

Penelitian sejarah mempunyai empat tahapan, yaitu:

1. Heuristik
2. Kritik sumber.
3. Interpretasi (analisa dan sintesis).
4. Penulisan Sejarah (historiografi).

Penelitian ini juga akan berbasiskan kepada pendekatan historis, yaitu kegiatan penelitian di mana peneliti menggali data yang telah terjadi di masa lampau.¹⁸

1.6.1 Heuristik

Heuristik merupakan suatu usaha mencari dan menemukan sumber sejarah. Secara sederhana, sumber-sumber sejarah itu dapat berupa: sumber benda, sumber tertulis dan sumber lisan. Secara luas lagi, sumber sejarah juga dapat dibeda-bedakan ke dalam sumber resmi formal dan informal. Selain itu dapat diklasifikasikan dalam sumber primer dan sekunder.¹⁹

Sumber sejarah sendiri merupakan segala sesuatu yang langsung atau tidak

¹⁷ Daliman. *Metodeologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2012, hlm.27.

¹⁸ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bandung: Bentang, 2005, hlm.91.

¹⁹ Ismaun, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bandung: Jurusan Pendidikan FPIPS IKIP Bandung, 1992, hlm.

langsung menceritakan kepada kita tentang suatu kenyataan atau kegiatan manusia pada masa lalu.²⁰ Sumber-sumber yang telah dimiliki penulis diantaranya:

1. Buku “Lekra Tak Membakar Buku” Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965, (2008), Yogyakarta: Muhidin M Dahlan, Rhoma Dwi Aria Yuliantri. Penerbit Merakesumba.
2. Buku “Lekra dan Geger 1965” (2015), Jakarta: Tempo. Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia.
3. Buku “Prahara Budaya” Kilas Balik Ofensif Lekra/PKI DKK, (1999), Jakarta: Moeljanto, Taufiq Ismail. Penerbit Mizan Pustaka.
4. Buku “Lekra, Lesbumi, Manifes Kebudayaan” Sejarah Sastra Indonesia Periode 1950-1965, (2018), Yogyakarta: Dr. Dwi Susanto, M.Hum. Penerbit CAPS (Center for Academic Publishing Service).
5. Buku “Komitmen Sosial dalam Sastra dan Seni” Sejarah Lekra 1950-1965, (2020), Bandung: Keith Foulcher. Penerbit Pustaka Pias.
6. Buku “Lekra Bagian dari PKI” (2015), Bandung: Ajip Rosidi. Penerbit Dunia Pustaka Jaya.
7. Buku “Pramoedya Ananta Toer dan Sastra Realisme Sosialis” (2022), Jakarta: Eka Kurniawan. Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
8. Buku “Seni, Politik, Pembebasan” (2018), Yogyakarta: Goenawan Mohamad. Penerbit Ircisod.

²⁰ Sjamsudin, *Metodeologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2007, hlm.95.

Pada tahapan ini mampu mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan dan dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya dalam upaya merekonstruksikan peristiwa-peristiwa di masa lampau. Tahap heuristik merupakan suatu cara dalam menemukan serta menghimpun sumber-sumber data yang ditemukan diberbagai tempat. Dalam melakukan heuristik tidak diperlukan peraturan-peraturan yang sifatnya umum sebab heuristik merupakan suatu teknik yang memerlukan terampilan dalam mencari data seperti sumber informasi dan jejak-jejak sejarah dimasa lampau. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti diantaranya:

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan teknik studi pustaka, yaitu menggunakan sumber-sumber sekunder berupa buku-buku, majalah, arsip, jurnal, website atau sumber-sumber yang lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini, baik Lekra dan Manikebu meninggalkan peninggalan-peninggalan sejarah perdebatan mereka yang terangkum, misalnya di dalam mukaddimah baik yang pertama maupun kedua, dan bagaimana pula naskah manifes kebudayaan sekaligus posisi kelompok kebudayaan tersebut di bawah bayang-bayang penguasa. Data-data ini akan dikaji secara kritis agar dapat mengupayakan pendeskripsian atas objek yang diteliti dengan lebih jelas.

1.6.3 Kritik Sumber

Setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah kritik sumber. Verifikasi atau kritik sumber merupakan tahap penelitian/penulisan setelah pengumpulan data. Kritik sumber bertujuan untuk mengetahui kredibilitas (dapat dipercaya atau tidaknya sebuah sumber) dan otensitas (asli atau tidaknya) sumber data yang dipakai. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kritik sumber dalam penulisan atau penelitian sejarah merupakan langkah yang harus dilakukan untuk menghindari adanya kepalsuan suatu sumber atau untuk mengetahui apakah data yang ada dapat dipertanggungjawabkan keasliannya atau tidak.²¹

1.6.4 Interpretasi

Usaha ini merupakan penafsiran terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari data-data yang telah diseleksi dan dilakukan kritik sumber. Proses memegang peranan penting bagi terjalannya fakta-fakta menjadi kisah sejarah yang utuh. Untuk menilai kebenaran suatu sumber sejarah perlu melakukan tahapan pengolahan data secara cermat, karena didalam data itu sendiri muncul subyektivitas yang mewarnainya. Interpretasi ini akan dijadikan pegangan atau arah yang akan menentukan tujuan dari penelitian ini. Akan dicari kebenarannya melalui analisis-analisis selama penelitian. Selanjutnya adalah analisis data yaitu mengolah data-data dari sumber-sumber yang ditemukan.

²¹ Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm.98.

1.6.5 Historiografi

Proses terakhir adalah historiografi. Historiografi ini merupakan klimaks dari sebuah metode sejarah. Di sinilah pemahaman dan interpretasi atas fakta-fakta sejarah itu ditulis dalam bentuk kisah sejarah yang menarik dan masuk akal. Dalam hal ini historiografi adalah penulisan skripsi ini.²²

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam menyusun skripsi ini, penyusunan dibagi menjadi lima bab. Dalam setiap bab akan terbagi menjadi beberapa sub bab. Hasil penelitian ini dituangkan dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Didalamnya terdiri dari beberapa sub bab diantaranya Latar Belakang Masalah yang menerangkan alasan dan minat dalam penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Landasan Teori, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II menjelaskan profil Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA).

Bab III menjelaskan kerangka kerja Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) dalam mengembangkan kesusastraan di Indonesia.

Bab IV mengidentifikasi visi kesusastraan yang dibawa Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) sehingga terjadi konflik ideologis antara Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) dan Manifes Kebudayaan (Manikebu).

²² Kartodirjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1982, hlm.58.

Bab V penutup berisi kesimpulan. Bab ini berisi pernyataan penulis mengenai hasil penelitian sekaligus jawaban atas permasalahan yang terdapat pada pendahuluan.